

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan Di Kabupaten Jember

Istianatul Lailiyah¹, Ria Wulandari², Muhammad Saiful Anam³

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
istianatullailiyah03@gmail.com¹, namakuwulan120@gmail.com²

Abstrak

Kemiskinan di kabupaten Jember merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan program kesejahteraan sosial. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani kemiskinan, merupakan fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive*, sedangkan data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumenter. Data dari wawancara diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data dokumenter didapat dari publikasi BPS, dokumen kebijakan, dsb. Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya validasi data, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan partisipatif, diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Peran Dinas Sosial Kab. Jember.

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan sosial, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan adalah kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Karena merupakan salah satu agenda utama nasional, penanganan kemiskinan membutuhkan pemahaman yang seragam serta tekad yang konsisten dari seluruh lapisan pemerintahan. Dengan adanya pemahaman dan komitmen yang selaras, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat tercapai lebih cepat.¹

Kemiskinan di Jember adalah salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah kota Jember. Isu kemiskinan ini menjadi salah satu masalah yang paling dominan. Kemiskinan juga mengakibatkan masalah baru seperti anak terlantar, kurangnya akses pendidikan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan data Maret tahun 2024, di Jember terdapat penduduk miskin sebanyak 224,77 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 11,69 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 236,46 ribu jiwa.² Masalah kemiskinan di Kota Jember memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Jember, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang telah diketahui, salah satu fungsi utama Dinas Sosial adalah menjalankan program-program kesejahteraan sosial, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif, diperlukan dukungan dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran (APBD), serta manajemen yang baik. Jika semua aspek ini dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat tercapai secara optimal. Namun, jika tidak, efektivitas program dapat terhambat.

Dinas Sosial adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah. Lembaga ini terbagi menjadi dua tingkat, yaitu Dinas Sosial di tingkat provinsi dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten atau kota. Dinas Sosial provinsi berada di bawah wewenang Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sementara Dinas Sosial kabupaten atau kota berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

¹ Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi." *Sosio Konsepsia* (2015): 194-205

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (1 Agustus 2024). Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember. dari <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html>

atau Kota. Dipimpin oleh seorang kepala dinas, Dinas Sosial memiliki tugas utama untuk membantu Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang sosial.³

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan, di antaranya Program Pengentasan Kemiskinan melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Program Sosialisasi. Selain itu, terdapat pula program perluasan bantuan sosial guna menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam implementasinya, upaya penanganan fakir miskin masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu Masalah yang sering timbul adalah tidak semua warga Masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat mengakses program tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya individu yang mengaku sebagai fakir miskin demi mendapatkan manfaat dari program pemerintah⁴, sehingga alokasi bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan kemiskinan masih belum optimal. Kurangnya validasi data serta sistem pengawasan yang belum maksimal turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas program. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan Masyarakat, serta berbagai pihak terkait agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan program sosial yang dijalankan. Melalui kerja sama yang solid, jangkauan program dapat diperluas dan efektivitasnya dapat meningkat sehingga lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat. Sinergi antar berbagai pemangku kepentingan ini menjadi kunci utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif. Dinas Sosial Kabupaten Jember juga terus melakukan pemetaan dan evaluasi kemiskinan secara berkala. Pemetaan data kemiskinan bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan. Dengan adanya pemantauan yang terus menerus, kebijakan yang ada dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat serta dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Kehadiran pemerintah, khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember, memiliki peran penting dalam menangani permasalahan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk usaha pengentasan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas ini, diperlukan dukungan yang cukup terkait sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, alokasi anggaran dari APBD, serta pengelolaan yang efisien. Keberhasilan program-program yang dijalankan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang optimal, dan sebaliknya, keterbatasan dalam aspek ini dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan⁵.

Dari pendahuluan yang telah disampaikan pernyataan tersebut menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara peran Dinas Sosial dalam melindungi masyarakat dari kemiskinan dengan dukungan kebijakan serta ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi antar lembaga sebagai elemen strategis menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember. Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya dengan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Jember.

METODE

Dalam upaya memastikan bantuan sembako tepat sasaran dan efektif, Penelitian ini menggunakan metode yang terstruktur dan sistematis. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan dan verifikasi penerima. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan penerima bantuan, sehingga hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang dapat menerima manfaatnya. Selain itu, survei lapangan dan pendataan ulang dilakukan untuk memverifikasi kondisi calon penerima. Proses ini juga melibatkan RT/RW, kelurahan, serta tokoh masyarakat guna memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah data penerima bantuan terverifikasi, tahap berikutnya adalah penyaluran bantuan sembako yang dilakukan melalui berbagai metode. Salah satunya adalah distribusi langsung ke rumah penerima, di mana petugas Dinas Sosial atau relawan mengantarkan paket sembako ke rumah-rumah, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, bantuan juga dapat dibagikan melalui pembagian di lokasi terpusat, seperti kantor kelurahan, balai desa, atau tempat umum yang mudah diakses oleh penerima bantuan. Pembagian ini diatur dengan jadwal yang terstruktur untuk menghindari kerumunan dan memastikan kelancaran distribusi. Masyarakat pun turut diajak berpartisipasi sebagai relawan dalam membantu proses distribusi, sehingga rasa kebersamaan dan gotong royong dalam membantu sesama dapat semakin kuat.

³ Zai, E., Marpaung, K. br, & Silviani, I. (2021). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 90-97

⁴ Hura, Niat Agustiani. Peranan Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun. *Diss. Universitas Medan Area*, 2022.

⁵ Rafsanjani, Muhammad Ali Akbar, Mohammad Ali Wafa, and Nuril Fuad. "Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kemiskinan Di Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.2 (2024): 119-123.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan yang rendah, terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan Pendidikan ketidak pastian tempat tinggal, serta ketidak berdayaan. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin tinggal di lingkungan yang tidak layak, kesulitan mendapatkan layanan medis, pendidikan dasar, dan kesempatan kerja. Mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dalam aspek ekonomi, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan partisipasi dalam aspek non-ekonomi. Selain itu, mereka memiliki pandangan dan ukuran kesejahteraan sosial mereka sendiri, yang memerlukan campur tangan dari pemerintah dan pihak terkait dalam pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berperan dalam menciptakan kemiskinan dan masalah sosial. Faktor internal mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjalankan peran sosial, dan mengatasi masalah sosial. Faktor eksternal mencakup kebijakan publik yang tidak mendukung masyarakat miskin, terbatasnya layanan sosial dasar, ketidakamanan hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketidakadilan sosial, kesenjangan, dan dampak pembangunan yang berfokus pada kapitalisme.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak orang miskin yang tidak dapat mengakses makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan, dan pendidikan. Penanganan masalah ini menjadi semakin kompleks karena penduduk miskin tidak dapat mengatasi tantangan internal maupun eksternal yang mereka hadapi. Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam merancang dan menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dinas sosial adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan dan program kesejahteraan sosial di kabupaten Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki peran krusial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dengan menggerakkan sumber daya dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal guna memastikan bahwa permasalahan kemiskinan dapat diminimalisir secara efektif. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Dinas Sosial berupaya merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun demikian, pemerintah melalui Dinas Sosial berupaya juga menangani masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dengan berkoordinasi bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Oleh karena itu, SKPD, terutama Dinas Sosial, yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyelesaian yang terorganisir, sistematis, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut. Untuk mewujudkannya, Dinas Sosial Kabupaten Jember memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan kesejahteraan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial memiliki beberapa fokus utama, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Upaya ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta RPJMD. Dalam menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial mengoordinasikan upaya tersebut melalui bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana. Secara khusus, program-program tersebut dikelola oleh Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, yang bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan sosial bagi fakir miskin melalui berbagai inisiatif yang telah dirancang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hariyono, staf Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, “program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin mencakup dua kegiatan utama. Pertama, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan rapat koordinasi (rakor), Program Keluarga Harapan (PKH), serta pengadaan seragam PKH yang ditujukan bagi operator dan pendamping PKH. Kedua, program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin, yang meliputi beberapa kegiatan seperti pendistribusian bantuan sembako serta pemberian bantuan bahan pokok kepada fakir miskin sebagai kelompok sasaran” (wawancara, 20 Januari 2025).⁶

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan pelayanan sosial bagi fakir miskin mencakup dua program utama, yaitu program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin serta program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin melalui pemberian bantuan bahan pokok bagi fakir miskin. Kedua program ini menjadi program unggulan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan. Diharapkan, pelaksanaan program-program tersebut dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam membantu fakir miskin meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam pelaksanaan implementasi pelayanan sosial bagi fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Selain Dinas Sosial itu sendiri, peran penting juga dimainkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK adalah individu yang ditugaskan dan diberi kewenangan oleh Kementerian Sosial, serta dinas atau

⁶ Wawancara dengan Hariyono, tanggal 20 Januari 2025 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember.

instansi di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk menjalankan tugas dalam jangka waktu tertentu. Mereka bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah tugasnya di tingkat kecamatan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa TKSK memiliki peran dalam membantu Dinas Sosial dalam berbagai aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan sosial bagi fakir miskin.

Salah satu tantangan utama Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang masih minim akses terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, memerlukan strategi pemetaan yang lebih akurat guna mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerataan distribusi bantuan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan dukungan yang layak. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta teknologi digital dalam pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga prosesnya dapat lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang sosial serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan akses terhadap program bantuan yang harus ditingkatkan, agar mereka lebih aktif dalam memanfaatkan peluang yang tersedia guna meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

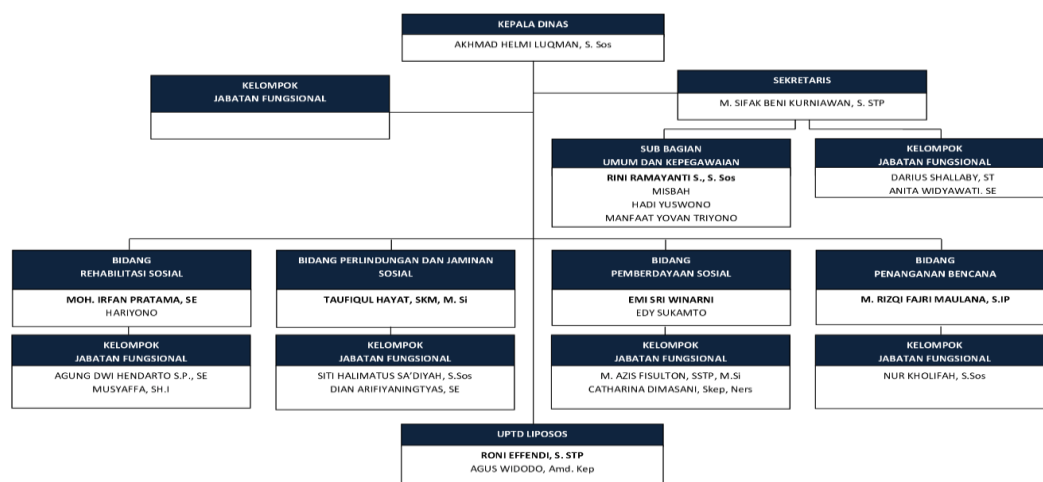
Dinas Sosial Kabupaten Jember berperan penting dalam penanggulan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu peran utama Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tunai, sembako, serta bantuan lainnya yang bersifat langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Beberapa program yang dijalankan, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), merupakan langkah nyata dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Melalui bantuan ini, diharapkan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dapat tetap bertahan dan memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar, dan anak jalanan. Melalui program rehabilitasi sosial, kelompok rentan ini diberikan pembinaan mental, pendidikan, serta pelatihan keterampilan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya pendekatan yang lebih humanis, kelompok ini tidak hanya mendapatkan bantuan sementara tetapi juga dibantu untuk membangun kembali kehidupan yang lebih layak.

Dinas sosial berperan sebagai motivator dengan melakukan pendekatan rohani dan jasmani, memberikan pembinaan, serta motivasi kepada para gelandangan dan pengemis agar dapat hidup mandiri dan layak. Upaya ini mencakup pembinaan mental dan keterampilan, serta pemberian bantuan sosial bagi yang memerlukan⁷. Dinas Sosial juga berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya solidaritas sosial, gotong royong, dan kemandirian. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya saling membantu dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap sesama. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung berbagai program sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, Dinas Sosial juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dalam menciptakan solusi sosial yang berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam mengatasi permasalahan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan di Dinas Sosial, diperlukan sebuah struktur organisasi yang efektif dan efisien. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pengelola Kantor Dinas Sosial dalam memahami tugas dan wewenang yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan serta Visi dan Misi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember. Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember:

:

⁷ Salsabila, M. B., Suharsono, A., & Negoro, A. H. S. (2023). Peran PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gependungan di Kabupaten Jember. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 9(1), 1-15



Gambar 1. Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing pengelola Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab untuk merancang, menyusun, dan menetapkan kebijakan serta program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember. Kebijakan ini bisa terkait dengan perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyusun dan mengimplementasikan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, lansia, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan.
- c. Melakukan rehabilitasi sosial bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan, korban bencana, atau mereka yang memiliki masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, tuna wisma, atau mantan narapidana. Kepala Dinas Sosial bertugas memastikan mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dan mandiri.
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, seperti pengentasan kemiskinan melalui program-program yang mendukung peningkatan taraf hidup dan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin.
- e. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah provinsi, lembaga sosial masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas sosial dalam menyelesaikan masalah sosial di Kabupaten Jember.
- f. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial, seperti pencegahan kekerasan, perlindungan anak, serta pentingnya integrasi sosial bagi kelompok yang terpinggirkan.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program sosial yang dijalankan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

2.Sekretaris

- Menyusun, mengelola, dan mendokumentasikan surat-menyurat, arsip, serta administrasi dinas.
- Membantu dalam menyusun jadwal dan agenda kegiatan dinas serta memastikan pelaksanaannya.
- Menjadi penghubung antara Kepala Dinas dengan unit kerja atau instansi lain, serta memastikan kelancaran komunikasi internal dan eksternal.
- Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Menyiapkan dan mengatur rapat-rapat dinas serta memastikan agenda rapat berjalan lancar.
- Membantu dalam pengelolaan anggaran dan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan kegiatan operasional dinas sehari-hari.

3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Mengelola administrasi umum, seperti surat-menyurat, arsip, dan dokumen penting lainnya.
- Mengatur administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan data pegawai, absensi, cuti, serta pengajuan dan pencatatan perjalanan dinas.
- Membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian kebutuhan pegawai sesuai dengan program dan kegiatan dinas.
- Menyediakan layanan terkait administrasi kepegawaian, seperti pengajuan kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi pegawai.
- Mengelola arsip kepegawaian, termasuk surat keputusan, peraturan, dan dokumen terkait pegawai.
- Memberikan informasi dan pembinaan terkait hak dan kewajiban pegawai dinas sosial.
- Melakukan koordinasi dengan bagian lain mengenai masalah kepegawaian dan menyusun laporan berkaitan dengan administrasi kepegawaian.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, seperti penanganan bencana, rehabilitasi sosial, atau pemberdayaan sosial.
- b. Memberikan penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat atau individu yang membutuhkan, terutama dalam hal kesejahteraan sosial.
- c. Menangani dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, seperti penanganan orang terlantar, penyandang disabilitas, atau korban bencana.
- d. Menyusun laporan kegiatan atau hasil kerja terkait dengan tugas fungsional yang dijalankan, serta mendokumentasikan setiap proses atau program yang telah dilaksanakan.
- e. Memberikan bimbingan, dukungan, serta rehabilitasi sosial bagi individu atau kelompok yang membutuhkan pemulihan atau reintegrasi sosial.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, dan pemberian modal usaha kecil.
- b. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pendamping sosial atau masyarakat itu sendiri, agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c. Menyusun dan melaksanakan program bantuan sosial, seperti bantuan untuk keluarga miskin, anak terlantar, lansia, atau penyandang disabilitas.
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan memantau efektivitas program-program yang sudah dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan sosial.
- e. Menyebarkan informasi tentang kebijakan sosial yang ada dan penting bagi masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan program-program sosial yang disediakan oleh pemerintah.

6. Bidang Penanganan Bencana

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara-cara mitigasi risiko bencana, penanganan darurat, dan upaya pencegahan bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi kerugian.
- b. Mengkoordinasi pemberian bantuan darurat kepada korban bencana, termasuk distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, kasur, selimut dan perlengkapan lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas pengungsian sementara yang aman dan layak huni bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ini termasuk mendirikan tenda pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, dan fasilitas kesehatan.
- d. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi pemerintah lainnya, TNI, Polri, organisasi relawan, dan lembaga kemanusiaan untuk mempercepat penanganan bencana.
- e. Melakukan pendataan terhadap korban bencana dan kondisi sosial di daerah terdampak. Hal ini penting untuk memantau perkembangan pasca-bencana serta untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemulihan tepat sasaran.

7. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Menyelenggarakan program jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan.
- b. Memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan.
- c. Menyuluhkan hak-hak sosial kepada masyarakat.
- d. Melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.

8. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial Memberikan layanan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi individu yang membutuhkan, agar mereka bisa kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan lembaga lain seperti rumah sakit, lembaga sosial, atau organisasi kemasyarakatan untuk mendukung proses rehabilitasi.
- c. Memberikan bantuan sosial
- d. Memantau dan mengevaluasi program rehabilitasi sosial agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan efektif.

9. UPTD Liposos

- a. Melakukan asesmen dan evakuasi terhadap klien lansia yang terlantar.
- b. Melakukan asesmen dan evakuasi terhadap klien ODGJ yang terlantar.
- c. Melakukan pendampingan perujuk klien ODGJ ke rumah sakit.

Secara umum, tujuan utama Dinas Sosial dalam menangani masyarakat, termasuk pengemis, adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Fungsi Dinas Sosial dan peran pekerja sosial mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Membantu individu dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara optimal guna menjalankan kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik melalui pelatihan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, maupun program rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak dan mandiri dalam jangka panjang.
- b. Menghubungkan individu dengan berbagai sistem sumber daya yang tersedia, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, akses modal usaha, serta bantuan sosial lainnya, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan sesaat tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup secara mandiri serta berkontribusi dalam masyarakat.

- c. Memfasilitasi interaksi antara individu dan sistem sumber daya agar dapat diakses secara efektif, dengan memberikan pendampingan administratif, edukasi mengenai hak dan kewajiban, serta menciptakan jembatan antara masyarakat yang membutuhkan dengan lembaga yang dapat memberikan bantuan, sehingga tidak ada pihak yang terabaikan dan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan sosial.
- d. Berperan dalam memengaruhi kebijakan sosial agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan advokasi, penelitian sosial, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang akurat kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
- e. Menyalurkan dan mendistribusikan sumber daya material secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dalam jangka panjang serta mencegah adanya penyalahgunaan atau ketimpangan dalam pendistribusiannya.⁸

Dengan peran dan fungsi yang dijalankan, Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemiskinan di wilayahnya. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, upaya peningkatan kesejahteraan sosial dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Melalui komitmen yang kuat dan langkah nyata dalam pelaksanaan berbagai program sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat krusial dalam usaha memperbaiki kesejahteraan sosial dan mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayahnya. Melalui berbagai program bantuan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial berupaya memberikan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan bahwa bantuan dan layanan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Dengan dukungan kebijakan yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan penyaluran bantuan, Dinas Sosial dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan memiliki akses lebih luas terhadap layanan dasar.

Pada akhirnya, keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsinya tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa besar dampak yang dihasilkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata, dinas ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat dan rasa terima kasih, penyusun ingin mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan berbagai arahan dan bimbingan dalam proses akademik.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah mendukung penyusun dalam menempuh pendidikan di jurusan ini.
4. Ibu Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah, atas segala kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Bapak M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan laporan ini.
6. Bapak Akhmad Helmi Luqman, S.Sos., selaku Pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di instansi yang beliau pimpin.
7. Ibu Rini Ramayanti S., S.Sos., selaku Dosen Pamong di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan arahan dalam kelancaran pelaksanaan PPL.

⁸ Lubis, Siti Abidah. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8.1 (2020): 92-109

8. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang telah dengan sabar membimbing serta memberikan pengalaman berharga selama pelaksanaan PPL.
9. Tidak lupa, penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (1 Agustus 2024). Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember. dari <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html>
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed.. SAGE Publications
- Hura, Niat Agustiani. Peranan Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun. Diss. Universitas Medan Area, 2022
- Lubis, Siti Abidah. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8.1 (2020): 92-109
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, Fajar, Marseto Marseto, and Sishadiyati Sishadiyati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember." *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 2.1 (2024): 239-254
- Rafsanjani, Muhammad Ali Akbar, Mohammad Ali Wafa, and Nuril Fuad. "Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kemiskinan Di Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.2 (2024): 119-123.
- Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi." *Sosio Konsepsia* (2015): 194-205
- Salsabila, M. B., Suharsono, A., & Negoro, A. H. S. (2023). Difabel Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gepeng di Kabupaten Jember. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 9(1), 1-15
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Suprianik, Muhammad Ali Akbar Rafsanjani, Mohammad Ali Wafa, dan Nuril Fuad. "Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kemiskinan Di Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 2 (Februari 2024): 119-123
- Wawancara dengan staf seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember Bapak Hariyono
- Zai, E., Marpaung, K. br, & Silviani, I. (2021). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 90-97